

Strategi Peningkatan Kesempatan Kerja Berbasis Potensi Wilayah: Evaluasi Tenaga Kerja Mandiri Pemula

Ari Yuliasuti¹

¹Pusat Pengembangan Kebijakan Ketenagakerjaan, Kementerian Ketenagakerjaan

ABSTRACT

Unemployment is a common social phenomenon in third-world countries, including Indonesia, which has an abundant workforce. One type of unemployment to note is open unemployment, which includes individuals who are unemployed and are looking for work or those preparing for independent enterprise. This phenomenon has a significant impact on the economic and social dynamics of a country. This study aims to evaluate the beginner Independent Workforce (TKM) program as part of efforts to expand employment opportunities in Indonesia. The CIPP evaluation method (Context, Input, Process, and Product) was used to thoroughly review this program. Data was collected through in-depth interviews, FGDs, and literature reviews, involving TKM recipients in several regions. The evaluation results show that the novice TKM program faces several obstacles, such as improper selection of business types, short periods of assistance, and poorly targeted selection of beneficiaries. The fast selection process also makes it difficult for business sustainability. The Bizhub system, which often experiences technical problems, also hinders beneficiaries' access. The study concluded that improvements need to be made in the design and implementation of the beginner TKM program, including increased clarity in the selection of business types, extension of the program period, and more mature selection of beneficiaries. More effective assistance and improvements to the administrative system are also needed to ensure the success of the program. Thus, the beginner TKM-based job opportunity expansion program can be more effective in supporting the growth of independent businesses and reducing unemployment in Indonesia.

 OPEN ACCESS

ARTICLE HISTORY

Received: 20-12-2023

Revised: 31-12-2023

Accepted: 10-01-2024

KEYWORDS

self-employed labor,
employment
opportunities,
unemployment

Corresponding Author:

Ari Yuliasuti

Pusat Pengembangan Kebijakan Ketenagakerjaan, Kementerian Ketenagakerjaan

Email: arie_yuliacancer@yahoo.co.id

Pendahuluan

Pengangguran merupakan fenomena sosial yang umum terjadi di banyak negara dunia ketiga, termasuk Indonesia, yang merupakan salah satu negara dengan jumlah tenaga kerja yang melimpah (Maryati, 2015). Keberadaan populasi tenaga kerja yang besar menjadikan Indonesia sebagai target pasar kerja yang signifikan bagi negara-negara maju seperti Eropa dan Amerika. Dalam konteks ini, salah satu jenis pengangguran yang perlu diperhatikan adalah pengangguran terbuka.

Pengangguran terbuka dapat didefinisikan sebagai keadaan di mana individu tidak memiliki pekerjaan dan sedang aktif mencari pekerjaan, atau mereka yang tidak memiliki pekerjaan sambil melakukan persiapan untuk memulai usaha mandiri (Dewi, 2017). Lebih lanjut, pengangguran terbuka juga mencakup individu-individu yang tidak memiliki pekerjaan dan tidak berusaha mencari pekerjaan, serta mereka yang telah memperoleh pekerjaan namun belum memulai pelaksanaannya (Maulana, 2020).

Fenomena pengangguran terbuka ini memiliki implikasi yang signifikan terhadap dinamika ekonomi dan sosial suatu negara. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang berbagai aspek pengangguran terbuka, seperti penyebabnya, dampaknya, dan solusi yang dapat diimplementasikan, sangat penting dalam upaya mengatasi masalah ini dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengembangkan strategi kebijakan yang efektif dalam mengatasi pengangguran terbuka dan mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (Safitri et al., 2021).

Pengangguran terjadi karena banyak tenaga kerja yang tersedia namun sedikitnya lapangan kerja yang memadai, sehingga menyebabkan banyak tenaga kerja yang tidak mendapatkan pekerjaan. Selain itu, pengangguran terjadi karena faktor tingkat pendidikan, kurangnya keterampilan, upah, PHK, dan lain-lain (Adriyanto et al., 2020). Bagi suatu negara, pengangguran menjadi masalah yang sangat serius karena apabila dibiarkan akan menimbulkan banyak masalah sosial seperti kemiskinan. Masalah pengangguran ini juga menyebabkan turunnya pertumbuhan ekonomi suatu negara karena tidak adanya output yang dihasilkan oleh pengangguran.

Sejak pandemi Covid-19, banyak dampak yang ditimbulkan oleh pandemi ini telah dirasakan dari segi ekonomi serta politik, sosial dan budaya. Dari perspektif ekonomi, pandemi ini juga tampaknya meningkatkan pengangguran di Indonesia karena banyak perusahaan telah menutup atau menghentikan operasi mereka, sehingga hal ini mendorong perusahaan untuk memberhentikan karyawan mereka.

Isu bonus demografi dan pengangguran di Indonesia sangat erat kaitannya dengan sektor ketenagakerjaan pada bidang perluasan kesempatan kerja. Data BPS pada Agustus 2020 menunjukkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 7,07 persen, meningkat 1,84 persen poin dibandingkan dengan Agustus 2019. Penduduk yang bekerja sebanyak 128,45 juta orang, turun sebanyak 0,31 juta orang dari Agustus 2019. Lapangan

pekerjaan yang mengalami peningkatan persentase terbesar adalah Sektor Pertanian (2,23 persen poin). Sementara sektor yang mengalami penurunan terbesar yaitu Sektor Industri Pengolahan (1,30 persen poin) (Badan Pusat Statistik, 2020).

Sebanyak 77,68 juta orang (60,47 persen) bekerja pada kegiatan informal, naik 4,59 persen poin dibanding Agustus 2019. Dalam setahun terakhir, persentase pekerja setengah penganggur dan persentase pekerja paruh waktu naik masing-masing sebesar 3,77 persen poin dan 3,42 persen poin. Terdapat 29,12 juta orang (14,28 persen) penduduk usia kerja yang terdampak Covid-19, terdiri dari pengangguran karena Covid-19 (2,56 juta orang), Bukan Angkatan Kerja (BAK) karena Covid-19 (0,76 juta orang), sementara tidak bekerja karena Covid-19 (1,77 juta orang), dan penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja karena Covid-19 (24,03 juta orang). Kondisi tersebut memerlukan terobosan kebijakan dan solusi yang signifikan untuk mengatasi dampak sosial terkait laju bonus demografi dan tingginya tingkat pengangguran di Indonesia. Berdasarkan data BPS 2022 menunjukkan bahwa jumlah pengangguran di Indonesia pada Februari 2022 adalah sebesar 8,40 juta penduduk. Dibandingkan jumlah pada bulan Februari tahun 2021 terjadi penurunan sekitar 350 ribu orang lebih. Sedangkan jika dibandingkan jumlah pada Agustus tahun lalu, penurunan sekitar 700 ribuan orang. Sehingga tingkat pengangguran terbuka (TPT) Indonesia pada Februari 2022 adalah sebesar 5,83 persen, relatif menurun jika dibanding dengan TPT Februari 2021 sebesar 6,26 persen. Namun angka TPT tersebut belum pulih dari kondisi sebelum pandemi yang berkisar 4,94 persen. Penurunan ini tentu merupakan awal yang baik, agar kita bisa secara signifikan mengurangi tingkat pengangguran (Badan Pusat Statistik, 2022).

Menurunnya tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2022 tentu tidak luput dari upaya-upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengurangi dampak pandemi terhadap dunia kerja. Dilansir dari web Kemnaker, ada enam upaya untuk mengurangi dampak Covid-19 terhadap dunia kerja yaitu (1) paket stimulus ekonomi untuk dunia usaha agar tidak melakukan PHK; (2) insentif pajak penghasilan bagi para pekerja; (3) jaring pengaman sosial melalui program bantuan sosial bagi pekerja formal dan informal; (4) pemberian prioritas Kartu Prakerja bagi para pekerja yang menjadi korban PHK; (5) perluasan industri padat karya; (6) perlindungan bagi para Pekerja Migran Indonesia (PMI) baik di negara penempatan maupun setelah kembali ke tanah air (Kemnaker, 2020).

Selain program-program tersebut, salah satu program Kemnaker yang menasar pada peningkatan angka wirausaha adalah Tenaga kerja Mandiri (TKM). TKM dibagi menjadi dua jenis, yaitu TKM Pemula dan Lanjutan. TKM pemula fokus pada pemberian bantuan yang bertujuan untuk penciptaan wirausaha baru. Sedangkan TKM lanjutan merupakan program lanjutan bagi penerima program TKM pemula yang telah berhasil mempertahankan usahanya. Meskipun begitu, tidak dapat dipungkiri TKM khususnya pemula menghadapi berbagai kendala dalam pelaksanaannya. Terdapat beberapa indikator dalam pelaksanaan TKM pemula yang perlu untuk dievaluasi demi perbaikan

program ke depan. Program tersebut tertuang dalam 9 lompatan kementerian ketenagakerjaan bahwa transformasi TKM melalui program perluasan kesempatan kerja yang lebih efektif dan berkesinambungan untuk memberdayakan tenaga kerja mandiri yang mampu meningkatkan penyerapan tenaga kerja (Jamhari & Khotimah, 2022).

Studi ini merupakan lanjutan dari studi tahun 2021 yang telah dilaksanakan di 5 (Lima) Kawasan yang dijadikan sebagai Pilot Project oleh Kemnaker. Pada kelima Kawasan tersebut telah dilakukan Profiling Kawasan, Grand Design yang terintegrasi dengan rencana besar kawasan, Penyiapan Kelembagaan Tenaga kerja Mandiri (TKM) dan inisiasi Kolaborasi dengan mitra kerja potensial dan Balai Latihan Kerja Komunitas (BLKK). Grand Design Pengembangan Model Perluasan Kesempatan Kerja Berbasis Kawasan yang telah tersusun dapat dijadikan acuan dalam melakukan Perluasan Kesempatan Kerja Berbasis Kawasan pada 15 (lima belas) kawasan baru. Pada Kawasan pilot perlu dilakukan kegiatan lanjutan agar tahapan yang telah dirumuskan di dalam Grand Design dapat dilakukan guna mencapai tujuan dalam memperluas kesempatan kerja.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian evaluasi dengan menggunakan model CIPP (*Context, Input, Process, dan Product*). Model evaluasi CIPP ini dapat mengevaluasi program TKM pemula secara keseluruhan terhadap komponen yang terlibat meliputi komponen *context, input, process, dan product* (Stufflebeam & Zhang, 2017). Pengambilan data dilakukan dengan metode primer dan sekunder. Metode data primer dengan melakukan wawancara mendalam (*indepth interview*) dan FGD kepada penerima TKM. Sedangkan data sekunder melalui *literature review*. Lokasi Penelitian berada di Jawa Barat (Karawang, Bogor dan Sukabumi), Jawa Timur (Mojokerto), Jawa Tengah (Batang dan Banjarnegara), dan Nusa Tenggara Barat (Mandalika Lombok Tengah). Jumlah penerima TKM Pemula ini berjumlah 107 kelompok dari jumlah itu, evaluasi ini mengambil sampel di Jawa Barat 10 Kelompok, Jawa Timur 8 Kelompok, Banten 6 Kelompok, dan Nusa Tenggara Barat 5 kelompok.

Hasil dan Diskusi

1. Temuan Lapangan

Berdasarkan metode analisis CIPP, hasil pengumpulan data primer dan studi literatur dipetakan ke dalam 4 indikator penyusun CIPP, yaitu *context, input, process, dan product*.

1.1. Context

Berdasarkan wawancara yang dilakukan selama proses pengumpulan data primer, dapat diidentifikasi beberapa kelemahan pada *indicator context* ini, di antaranya adalah:

a. Jangka waktu pemberian

Program TKM pemula *existing* diberikan dalam satu kali tahun anggaran. Artinya jika program ini berjalan efektif praktis hanya akan ada 12 belas bulan bagi penerima program untuk mengembangkan usahanya. Seperti yang diketahui, kewirausahaan bukanlah merupakan sebuah kemampuan instan yang dapat berkembang dalam waktu yang singkat. Terlebih jika melihat kondisi di lapangan, bantuan TKM pemula baru turun pada akhir tahun berjalan, yaitu pada bulan November. Hal ini berarti penerima program hanya memiliki kesempatan satu hingga dua bulan untuk mengoptimalkan penggunaan dana.

Hal ini tentu sangat jauh dari efektif. Ke depan, diharapkan identifikasi calon penerima TKM pemula dapat dilakukan pada saat t-1 atau setahun sebelumnya, bahkan seleksi dan pengumuman diharapkan juga telah dapat direalisasikan pada akhir tahun t-1. Sehingga pada saat awal tahun t program TKM telah berjalan sesuai yang direncanakan. Hal ini setidaknya dapat meminimalisir minimnya waktu pelaksanaan program TKM pemula. Idealnya program TKM dapat dijalankan untuk seorang penerima secara multi years. Artinya setiap penerima dapat terus mendapatkan bantuan tidak hanya satu tahun.

b. Penentuan sasaran penerima

Dari temuan lapangan menunjukkan bahwa penerima TKM tidak memiliki program kerja dan rencana pengembangan usaha yang signifikan. Akibatnya *sustainability* usaha penerimanya rendah. Pelibatan ahli atau pelaku usaha sejenis perlu dilakukan untuk memastikan feasibilitas usaha dari calon penerima TKM. Ahli atau pelaku usaha tersebut juga yang selanjutnya memberikan rekomendasi kepada Kementerian Ketenagakerjaan dalam hal ini Direktorat Perluasan Kesempatan Kerja untuk menerima atau menolak proposal calon penerima. Demikian pula peran dari ahli dapat dikembangkan hingga jenis bantuan apa yang dapat diberikan kepada calon wirausaha.

c. Koherensi tujuan akhir dengan kondisi awal

Konsep dari program TKM khususnya TKM pemula adalah untuk menciptakan wirausaha-wirausaha baru. Tujuan awal ini harus tertanam dengan kuat di benak pemberi dan penerima bantuan. Beberapa kasus yang ditemui di lapangan menunjukkan bahwa TKM pemula terkesan sebagai pemberian hadiah tanpa proses pemantauan dan *sustainability*. Kementerian Ketenagakerjaan dalam hal ini Direktorat Perluasan Kesempatan Kerja tidak menjadi satu-satunya pihak yang patut disalahkan. Motif calon penerima bantuan berperan penting dalam keberhasilan ini. Menjadi sangat sulit untuk menilai motif seseorang dalam pengajuan TKM, apakah keinginan kuat menjadi seorang wirausahawan atau hanya ingin mendapatkan bantuan semata tanpa tujuan yang jelas.

Metode asesmen dan seleksi menjadi titik penting pada tahap ini. Pelibatan ahli dan pelaku usaha sejenis menjadi hal penting untuk mengukur kejelasan usaha yang

diusulkan. Selain itu, waktu seleksi perlu diperpanjang sehingga memungkinkan calon penerima menyimulasikan usahanya.

1.2. Input

Berdasarkan wawancara yang dilakukan selama proses pengumpulan data primer, dapat diidentifikasi beberapa kelemahan pada *indicator Input* ini, di antaranya adalah:

a. Metode seleksi calon penerima bantuan

Dalam jangka pendek, ketersediaan petunjuk teknis untuk seleksi, pengumuman, pencairan bantuan dan pendampingan serta pelaporan menjadi hal yang mendesak untuk dipenuhi. Saat ini juknis TKM bersifat umum dari hulu hingga hilir. Pembuatan juknis yang detail dan komprehensif menjadi salah satu kunci keberhasilan program. Juknis tersebut hendaknya juga menjelaskan bisnis proses dan pelaksana di masing-masing tahapan.

b. Website/aplikasi bizhub sering eror

Sejak pemberlakuan konsep baru kewirausahaan, penggunaan Bizhub menjadi hal yang baru pula dalam pelaksanaan TKM baik pemula maupun lanjutan. Bizhub merupakan bagian dari SIAPKerja yang diperuntukkan khusus bagi penerima bantuan TKM. Meskipun secara konsep Bizhub telah sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat saat ini, yaitu kecepatan akses, berbasis IoT, dan terpantau. Namun tidak dapat dipungkiri Bizhub masih memiliki beberapa kelemahan dan kendala.

Berdasarkan temuan lapangan, penerima program TKM sering mengalami kendala server Bizhub yang error atau down. Meskipun Bizhub relatif berbeda dengan layanan lain dalam SIAPKerja yang membutuhkan interaksi intens secara online, namun kesiapsiagaannya tetap dibutuhkan.

c. Petunjuk teknis tidak terlalu jelas dan sulit dipahami oleh calon penerima bantuan

Petunjuk teknis TKM yang saat ini dimiliki oleh Kemnaker tidak mencantumkan secara rinci setiap bisnis proses dan penanggung jawab untuk masing-masing tahapan. Hal ini menyulitkan calon penerima dan bahkan pihak Kemnaker sendiri untuk memahami alur pemberian bantuan TKM.

Berdasarkan temuan lapangan, pihak penerima TKM merasa kesulitan untuk memahami petunjuk teknis yang tersedia. Rekomendasi penyusunan petunjuk teknis menjadi hal mendesak yang harus segera dilakukan.

d. Pemberian perlengkapan usaha sering tidak sesuai dengan permintaan

Ketidaksesuaian antara usulan bantuan dengan realisasi masih banyak ditemui. Meskipun jumlahnya relatif sedikit namun temuan ini setidaknya membuktikan bahwa

koordinasi antara pemberi dan penerima bantuan TKM masih lemah. Ketidaksiuaian ini umumnya menyangkut spesifikasi dan kualitas barang/sarana yang diberikan.

1.3. Process

Berdasarkan wawancara yang dilakukan selama proses pengumpulan data primer, dapat diidentifikasi beberapa kelemahan pada *indicator Process* ini, di antaranya adalah:

a. Pendaftaran

Hambatan yang sering ditemui pada saat pendaftaran di antaranya adalah pengumuman yang kurang tersebar luas sehingga calon penerima bantuan yang mendaftar informasi terbatas. Hambatan lain adalah website untuk layanan Bizhub yang sering *error* atau *down*.

b. Seleksi

Peminat program TKM yang besar sering berdampak pada panjangnya waktu yang dibutuhkan untuk verifikasi dokumen sehingga memaksa waktu realisasi bantuan bergeser pula. Perlu disusun metode seleksi yang lebih efektif misalnya dengan verifikasi dokumen yang seluruhnya berbasis online.

Seleksi jumlah yang banyak memerlukan waktu verifikasi sehingga jadwal penetapan tidak tepat waktu.

c. Pelatihan

Jangka waktu pelatihan yang singkat juga menjadi salah satu permasalahan penerima TKM untuk menyerap ilmu kewirausahaan yang diberikan. Hendaknya pelatihan yang diberikan mencakup teori dan praktik serta simulasi usaha yang diusulkan pada saat seleksi.

Responden mengatakan bahwa kendala pada saat pelatihan adalah tidak fokusnya materi yang diberikan karena dipaksakan dalam waktu yang singkat.

d. Pencairan bantuan

Hal yang ditemui penerima bantuan pada saat pencairan bantuan adalah adanya kebijakan bank di pusat dan daerah terkadang tidak sinkron. Perlu skema pencairan dana alternatif untuk memudahkan penyaluran bantuan

e. Pelaksanaan

Pelaksanaan program TKM yang hanya satu tahun anggaran dan bahkan efektif hanya beberapa bulan tentunya sangat jauh dari ideal. Hendaknya TKM dapat diberikan menjadi skema *multi years*

f. Pendampingan

Singkatnya waktu pelaksanaan berimplikasi panjang pada pendampingan. Akibatnya pendampingan hanya bersifat administrasi. Padahal pendampingan ini menjadi hal yang penting untuk berkonsultasi dan mengembangkan usaha.

g. Pelaporan

Pelaporan belum sepenuhnya bisa dikerjakan sesuai waktu karena pencairan di akhir periode tahun berjalan.

1.4. Product

Berdasarkan wawancara yang dilakukan selama proses pengumpulan data primer, dapat diidentifikasi beberapa kelemahan pada *indicator product* ini, di antaranya adalah:

a. Ketidaksiapan dan ketidakoptimalan selama proses berdampak pada produk yang dihasilkan

Kelemahan yang ditemui sejak proses pengajuan, seleksi, pencairan, hingga penyusunan laporan berdampak pada hasil akhir TKM menjadi tidak sesuai yang diharapkan. Hal pokok dari program TKM adalah terciptanya wirausaha baru yang *sustain* dan berdampak pada pengurangan pengangguran. Hasil pengamatan lapangan mengesankan hal tersebut masih jauh dari harapan.

b. Belum ada standarisasi keberhasilan program TKM pemula

Target TKM pemula adalah terciptanya wirausaha baru. Akan tetapi belum ada suatu standar baku mengenai keberhasilan TKM pemula agar dapat dikatakan telah berhasil menjadi wirausaha pemula. Oleh karena itu **perlu** dibuat standar kategori penerima bantuan yang berhasil, dan kurang berhasil dengan penilaian yang obyektif dan standar yang jelas.

c. Instrumen monitoring dan evaluasi belum jelas dan terukur

Instrumen monitoring dan evaluasi juga menjadi hal yang penting untuk menilai keberhasilan selama dan pasca pelaksanaan program TKM pemula.

Dari gambaran penerima TKM di 4 daerah yang telah diamati, terdapat beberapa temuan yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pelaksanaan program TKM khususnya TKM pemula belum berjalan secara optimal karena masih ditemui beberapa kendala, yaitu:

- a) Pemilihan jenis usaha yang kurang tepat. Hal tersebut dikarenakan tidak adanya pendampingan lapang dari TKS. Pemilihan jenis usaha menjadi asal karena tidak adanya riset mendalam dari akademisi maupun dari kementerian. Sehingga, jenis

usaha yang dilakukan tidak ada *link and mach* antara jenis usaha TKM dan kawasan.

- b) Jangka waktu pemberian bantuan sangat singkat, yaitu hanya satu tahun, terlebih dari temuan lapang diperoleh bahwa bantuan baru terealisasi di bulan November. Sehingga, dengan waktu yang cukup singkat tidak terjadi optimalisasi jenis usaha yang dilakukan.
- c) Penerima bantuan tidak tepat sasaran atau tidak memiliki rencana kegiatan yang matang, sehingga dalam perkembangannya berpotensi mengalami kegagalan usaha. Hal tersebut dikarenakan tidak adanya riset dari kementerian. Sehingga, rencana kegiatan menjadi asal-asalan.
- d) Proses seleksi meliputi verifikasi dokumen hingga pengumuman berjalan dalam waktu yang relatif singkat, sehingga sangat sulit untuk menjamin *sustainability* usaha.
- e) Sistem Bizhub masih sering eror atau down, sehingga menyulitkan penerima bantuan untuk mengakses. Adanya kesalahan NIK anggota kelompok TKM dalam menginput. Sehingga pada saat pendaftaran sering penerima TKM yang baru mendaftar dalam sistem bizhub. hal tersebut, menyulitkan kelompok TKM dalam pendaftaran.

2. Desain Perluasan Kesempatan Kerja

Perluasan kesempatan kerja menjadi jalan dalam mengurangi pengangguran di pedesaan. Model desain perluasan kesempatan kerja melalui peningkatan wirausaha muda dan mandiri yang mengintegrasikan program pengembangan kewirausahaan dengan program pengembangan kapasitas (pelatihan) dan program padat karya yang diharapkan dapat terhubung dengan program-program lain yang berada di dalam suatu Kawasan. Salah satu kegiatan yang menjadi penggerak pengembangan kawasan adalah hilirisasi komoditas lokal pada kawasan tersebut melalui peningkatan nilai tambah komoditas lokal. Perluasan kesempatan kerja pada bagian hilir ini akan turut menggerakkan perubahan kinerja kawasan.

Berdasarkan pemetaan potensi sumber daya pada 5 lokasi yaitu (1) Perhutanan Sosial Teluk Jambe, Kabupaten Karawang, (2) Agrowisata Lido, Kabupaten Bogor dan Sukabumi, (3) Agroforestri Dataran Tinggi Dieng, Kabupaten Batang dan Banjarnegara (4) Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika Lombok Tengah dan (5) Wisata Budaya, Mojokerto, maka dapat disimpulkan bahwa komoditas berbasis pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan masih menjadi potensi kunci perluasan kesempatan kerja. Maka dapat dijelaskan bahwa 5 lokasi perluasan kesempatan kerja dikatakan utamanya masih berbasis pada sumber daya alam dan pertanian dalam arti luas. Pertanian masih merupakan sumber mata pencaharian bagi sebagian besar tenaga kerja di 5 kawasan tersebut. Dengan karakteristik dan potensi tersebut, maka perluasan kesempatan kerja perlu didorong untuk peningkatan nilai tambah dari komoditas lokal yang berada di

kawasan tersebut. Keberadaan tenaga kerja mandiri sebagai wirausaha yang menggerakkan perubahan positif di masyarakat melalui peningkatan nilai tambah produksi pertanian.

Setiap Kawasan tampaknya memiliki banyak kesamaan dalam konteks ketersediaan tenaga kerja dan ketersediaan lahan pertanian namun ada kespesifikan untuk hal-hal tertentu. Di Teluk Jame yang sangat berdekatan dengan kawasan industri besar, yang tentu saja berbeda dengan Lembah Mbencirang di Mojokerto yang punya kespesifikan dalam hal dukungan sumber daya alam dan sosial ekologi. Berbeda pula dengan kawasan KEK mandalika yang memiliki potensi pariwisata. Dengan melihat potensi sumber daya alam dan ketersediaan tenaga kerja di kawasan tersebut, tenaga kerja perlu dipetakan secara tepat sehingga pelatihan yang diberikan sesuai dengan keinginan dan kebutuhan sumber daya manusia setempat.

Kearifan lokal harus diutamakan dalam penyediaan atau perluasan tenaga kerja dengan mengutamakan penduduk lokal setempat yang didukung oleh penduduk pendatang yang pada umumnya memiliki daya juang lebih tinggi. Sinergi penduduk lokal dan pendatang harus dibangun melalui cara-cara humanis dalam semangat saling menghormati sehingga tercipta suasana rukun damai sejahtera hidup berbaur dalam bingkai persatuan Indonesia.

Dalam upaya memperluas lapangan pekerjaan berbasis kawasan, tenaga kerja yang disiapkan dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu tenaga kerja dalam hubungan kerja (karyawan) dan tenaga kerja non- hubungan kerja (tenaga kerja mandiri - TKM) yang kemudian dapat dibagi lagi menjadi dua yaitu (i) TKM produsen (penghasil produk). Seperti buah-buahan, sayuran, ternak hidup, daging, atau bahan pangan olahan; (ii) TKM layanan (penghasil jasa) seperti tukang potong rambut, tukang kayu, tukang rias manten, dan lain-lain; Dengan membedakan TKM, pendekatan yang digunakan sangat berbeda untuk setiap TKM.

Tenaga kerja dalam hubungan kerja (karyawan) sangat tergantung kepada ketersediaan lowongan pekerjaan di pabrik dan tergantung kepada kompetensi yang dimiliki tenaga kerja. Walaupun masyarakat calon tenaga kerja berdomisili dekat dengan kawasan industri, mereka tidak dapat dijamin menjadi pegawai jika kompetensinya tidak memenuhi syarat. Dalam hal ini, tenaga kerja jenis ini perlu diberikan pelatihan khusus sesuai dengan kebutuhan industri sekitar kawasan. Ketika tenaga kerja ini memenuhi persyaratan yang dibutuhkan industri, mereka dapat bekerja secara terus menerus sampai dengan masa produktif, sepanjang tidak membuat cela dan melakukan tindakan yang melanggar aturan tempat mereka bekerja.

Tenaga kerja mandiri yang berkecimpung dalam penyediaan layanan (jasa) dapat mudah tersedia karena kualifikasi yang sangat beragam. TKM jenis ini bisa saja tidak pernah sekolah sampai lulus sarjana karena pekerjaan dapat diciptakan sendiri untuk

memenuhi kebutuhan konsumen atau dapat disediakan pihak lain yang membutuhkan tenaga secara instan dalam jangka waktu tertentu dengan membutuhkan tenaga kerja yang banyak, misalnya membangun Gedung perkantoran atau membangun bendungan, dan sejenisnya. Pelatihan dapat diberikan dalam waktu singkat dan hanya untuk memenuhi kebutuhan sesaat itu saja.

Tenaga kerja mandiri produsen di kawasan ini yang berbeda. Ini upaya membangun dan memberdayakan masyarakat yang tinggal di Kawasan dengan memaksimalkan lahan yang dimiliki dan produk apa yang dapat diproduksi. Karena kepemilikan lahan per orang di Kawasan umumnya tidak luas, maka perencanaan membuat skala ekonomi harus dilakukan melakukan konsolidasi masyarakat pemilik lahan. Ini tidak dapat dilakukan secara instan tetapi memerlukan waktu yang tahapannya dapat meliputi (i) perubahan pola pikir/*mindset*; dilanjutkan (ii) pemahaman makna berhimpun dan berjamaah dalam memproduksi barang; dan terakhir (iii) penguatan iptek untuk meningkatkan efisien dan produktivitas dalam menjalankan usaha berjemaahnya. Oleh karena itu, dalam mempersiapkan tenaga kerja dalam kawasan tersebut di atas diperlukan strategi yang berbeda. Ketiganya dapat dibedakan dalam hal: (i) kriteria untuk setiap TKM, (ii) prasyarat yang harus dimiliki, (iii) pihak yang dijadikan sasaran. Dalam setiap Kawasan, masyarakat akan diarahkan ke salah satu TKM berdasarkan tiga hal tersebut.

Calon TKM tersebut diobservasi secara seksama oleh pakar untuk diberi pembekalan yang komprehensif dan mudah dipahami mengingat keberagaman latar belakang masyarakat di Kawasan. Bisa jadi dalam satu Kawasan, semua masuk ke TKM produsen atau semua masuk ke TKM layanan saja atau bisa jadi ketiga jenis TKM tersebut tersedia semua. Berdasarkan klasifikasi TKM tadi, perlu disusun daftar identifikasi masalah di setiap TKM untuk menentukan kebutuhan yang diperlukan. Bukan kebutuhan pekerjaan tetapi kebutuhan internal TKM agar mampu mengisi lapangan pekerjaan atau menciptakan lapangan pekerjaan. Masalah yang teridentifikasi tadi menjadi sasaran untuk diperbaiki dengan menggunakan anggaran kegiatan yang besarnya Rp. 54 juta per TKM. Anggaran ini tidak boleh dibagikan kepada orang dalam TKM tetapi harus diwujudkan dalam kegiatan yang membuat mereka dapat mengisi lowongan pekerjaan atau mereka dapat menciptakan pekerjaan.

Mengembangkan Kawasan bertumpu pada kearifan lokal dan mengutamakan penduduk local tidak dapat dilakukan sendiri oleh satu unsur saja. Sinergi dan kolaborasi minimal empat unsur harus dilakukan mulai dari perencanaan, implementasi, dan evaluasi kemajuannya. Setidaknya ada unsur pemerintah sebagai penghela utama, dalam hal ini adalah pemerintah kabupaten (bupati) dengan perangkat di bawahnya yang meliputi camat dan kepala desa. Pemerintah kabupaten yang mengetahui lebih banyak tentang kondisi manusia dan sumber daya alamnya berperan penting untuk (i) memberikan informasi tentang kawasan target TKM, (ii) memfasilitasi kebutuhan TKM

yang digunakan secara bersama, (iii) membuat regulasi yang pro TKM dalam pengembangannya, (iv) menyinergikan kegiatan kecamatan dan kepala desa terkait dengan pengembangan TKM.

Pengusaha atau pemodal sebagai *offtaker* yang menjamin ketersediaan pasar untuk menyerap produk yang dihasilkan TKM Produsen. Offtaker berperan untuk; (i) memberikan jaminan untuk memasarkan produk yang dihasilkan TKM; (ii) jika dimungkinkan membantu dalam permodalan melalui kemitraan bagi hasil dengan pembayaran secara *yarnen* (bayar setelah panen) (iii) membuka jaringan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja TKM (iv) bersinergi dengan Pemkab untuk mendorong terbitnya regulasi yang kondusif.

Komunitas masyarakat yang terkonsolidasi dengan kawasan seperti di Lido Bogor yang terintegrasi dengan kawasan industri, atau yang terjadi di Kab. Mojokerto yang terintegrasi dengan kawasan pariwisata budaya (seni budaya majapaid). Ini merupakan unsur terpenting karena menjadi subjek pembangunan di setiap Kawasan dengan peran sebagai berikut: (i) bekerja dengan tekun dan profesional atas bimbingan dan dukungan dari ketiga unsur di atas (ii) Memiliki semangat bekerja dan lahan produktif atau lahan yang dapat dibuat produktif (iii) berbisnis secara kolektif berjamaah dan membentuk kelembagaan seperti koperasi yang benar dan sesuai prinsip kebersamaan; (iv) mengikuti aturan yang disepakati empat pihak sehingga terbentuk usaha yang kuat dan berkelanjutan.

Berdasarkan uraian permasalahan yang dihadapi selama pemberlakuan TKM tersebut, dapat ditarik beberapa rekomendasi yang dapat dijadikan pertimbangan untuk menyusun desain baru perluasan kesempatan kerja khususnya TKM pemula adalah sebagai berikut:

a. Jangka waktu pemberian program diperpanjang

Banyak kajian yang membuktikan bahwa untuk menjadi seorang wirausahawan membutuhkan waktu yang sangat panjang. Bukan dalam hitungan bulan apalagi hari. Program TKM yang selama ini terlaksana dilaksanakan dalam satu tahun anggaran atau dua belas bulan. Pemberian program diperpanjang dimulai dari bulan Januari sehingga mampu meningkatkan efektivitas pemberian program perluasan kesempatan kerja.

b. Kejelasan proposal usaha

Dalam evaluasi yang dilakukan dalam pembuatan proposal belum adanya kejelasan panduan yang lengkap. Sehingga, banyak penerima TKM yang merasa kesulitan dalam membuat proposal. Pembuatan proposal di berikan pada pendamping lapang. Sehingga tidak terjadi *transfer knowledge* pada penerima TKM pada arus bawah masyarakat. penerima TKM banyak yang mengalami kesalahan dalam pemilihan usaha

karena tidak ada pendampingan awal dalam pemilihan jenis usaha. Sehingga pemilihan usaha yang salah menyebabkan tidak adanya keberlanjutan usaha.

c. Metode seleksi langsung dengan pelaku usaha sejenis.

Dalam proses seleksi pelaku usaha diharuskan adanya pendampingan ekspert mulai dari pemilihan jenis usaha sampai dengan pasar yang di akan disasar. Sehingga, jenis usaha sudah mampu memetakan arah usaha dari hulu sampai dengan hilir. Sehingga, dalam satu desa mampu memproduksi hasil baik pertanian maupun perikanan dan jenis usaha lainnya. maka dengan model seleksi jenis usaha pada TKM sehingga mampu mengintegrasikan usaha satu dengan yang lain. Usulan jenis usaha dan bantuan yang diajukan merupakan rekomendasi dari konsultan atau pelaku usaha sejenis dan bukan dari calon penerima bantuan.

Jenis usaha dan bantuan yang di ajukan merupakan rekomendasi dari konsultan. Seperti penerima TKM sebagai contoh jenis usaha pertanian memiliki tradisi bertani dan potensi produksi yang cukup atas suatu komoditas tertentu dan didukung oleh infrastruktur kelembagaan yang relatif baik, yaitu koperasi atau gapoktan ataupun Badan Usaha Milik Desa (Bumdes). Sehingga diharapkan masing-masing desa punya setidaknya satu *core business* berbasis pertanian yang sesuai dengan potensi terbesarnya; akan sangat baik apabila ada *local specific* produk sehingga berdampak mempersempit area kompetisi dengan produk sejenis dari daerah lain. Di beberapa negara, konsep ini dikenal dengan "Ove Village One Product" (OVOP), Ove Village One Company (OVOC). Sehingga terjadi integrasi jenis usaha satu dengan yang lain. maka, adanya integrasi satu dengan yang lain mampu untuk penyerapan tenaga kerja di pedesaan berbasis TKM.

d. Pendampingan melibatkan langsung pelaku usaha sejenis dan konsultan usaha profesional

Pendampingan langsung yang dilakukan oleh profesional, sehingga mampu menciptakan jenis usaha yang *sustainability*. Pendampingan diharapkan mampu mengkaji lebih dalam peluang dan strategi nafkah masyarakat di pedesaan. Kondisi tersebut tidak mengubah secara signifikan jenis nafkah rumah tangga yang ada di masyarakat. sehingga, jenis usaha yang dipilih berdasarkan pada usaha yang selama ini dilakukan oleh masyarakat.

Desain alternatif berbasis CIPP menjadi rekomendasi tindak lanjut program perluasan kesempatan kerja berbasis TKM.

a) Desain Context

Berdasarkan penjelasan di atas maka *context* tidak lepas dengan adanya profiling awal calon penerima TKM. Profiling awal yang dilakukan oleh tim dari pemerintah maupun NGO. Profiling dalam usaha tidak terlepas dengan aspek budaya masyarakat, hal

tersebut membuat *sustainable* pada usaha yang dijalankan. Pada konteks kebijakan pemerintah tidak bersifat *top down* tetapi bersifat *bottom up*.

b) Desain Input

Berdasarkan penjelasan di atas maka desain perluasan kesempatan kerja berbasis TKM, bahwa setelah profiling potensi jenis usaha TKM memudahkan jenis usaha yang akan dilakukan oleh calon penerima TKM. Jenis usaha yang berdasarkan kebutuhan masyarakat tetapi tidak harus didampingi dengan riset secara akademik kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat dari hulu sampai dengan hilir hasil produk TKM.

c) Desain Process

Keberhasilan TKM tidak terlepas dengan adanya pendampingan baik dari pemerintah maupun pihak yang terkait seperti NGO. Pemerintah sudah membuka kran yang selama ini macet untuk pelatihan kepada masyarakat. seperti pelatihan sudah tidak perlu lagi dilakukan di tingkat provinsi maupun di kabupaten. Guna mempermudah pelatihan bagi penerima TKM sehingga pendampingan kepada masyarakat pedesaan yang kurang terlatih menjadi lebih mudah. Sehingga mampu mengoptimalkan jenis usaha yang sedang dikembangkan oleh kelompok TKM. Peran pendamping seperti TKS menjadi sangat sentral karena mereka sebagai ujung tombak keberhasilan TKM di kawasan tersebut.

d) Desain Product

Pendampingan dari pemerintah tidak hanya memberikan pelatihan dan modal usaha. pada aspek tertentu juga dibutuhkan peningkatan nilai komoditas sehingga produk yang dihasilkan memiliki nilai jual yang tinggi pada suatu komoditas produk hasil TKM. Jenis produk yang dihasilkan harus mampu mewakili baik secara ekonomi maupun budaya mereka. sehingga kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam perluasan kesempatan kerja berbasis TKM tidak hanya pembangunan menguntungkan secara kapitalis tetapi juga melestarikan budaya masyarakat setempat.

Simpulan

Desain baru untuk program perluasan kesempatan kerja, terutama yang ditujukan bagi Tenaga Kerja Mandiri (TKM) Pemula, merupakan hasil dari pemahaman mendalam terhadap tantangan yang muncul selama pelaksanaan di lapangan. Beberapa langkah yang perlu dipertimbangkan dalam mengembangkan desain baru program ini termasuk perpanjangan jangka waktu program, peningkatan kejelasan dalam proposal usaha yang diajukan, penerapan metode seleksi yang melibatkan pelaku usaha sejenis, perpanjangan waktu seleksi untuk memungkinkan simulasi usaha, keterlibatan konsultan atau pelaku usaha sejenis dalam menentukan jenis usaha dan bantuan yang tepat, serta pendampingan yang melibatkan pelaku usaha berpengalaman dan konsultan usaha profesional.

Daftar Pustaka

- Adriyanto, A., Prasetyo, D., & Khodijah, R. (2020). Angkatan Kerja dan Faktor yang Mempengaruhi Pengangguran. *Jurnal Ilmu Ekonomi & Sosial Unmus*, 11(2), 463-440.
- Badan Pusat Statistik. (2020). *Agustus 2020: Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 7,07 persen*. <https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/11/05/1673/agustus-2020--tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-7-07-persen.html>
- Badan Pusat Statistik. (2022). *Februari 2022: Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,83 persen dan Rata-rata upah buruh sebesar 2,89 juta rupiah per bulan*. <https://www.bps.go.id/pressrelease/2022/05/09/1915/februari-2022--tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-5-83-persen.html>
- Dewi, S. K. S. (2017). *Konsep dan pengembangan kewirausahaan di Indonesia*. Deepublish.
- Jamhari, T., & Khotimah, N. (2022). Program Tenaga kerja Mandiri (TKM): Konsep dan Implementasi. *Jurnal Ketenagakerjaan*, 17(3), 270-286.
- Kemnaker. (2020). *Pemerintah Antisipasi Penambahan Pengangguran di Masa Pandemi Covid-19*. <https://www.kemnaker.go.id/news/detail/pemerintah-antisipasi-penambahan-pengangguran-di-masa-pandemi-covid-19>
- Maryati, S. (2015). Dinamika pengangguran terdidik: tantangan menuju bonus demografi di Indonesia. *Economica: Jurnal Program Studi Pendidikan Ekonomi STKIP PGRI Sumatera Barat*, 3(2), 124-136.
- Maulana, A. S. (2020). *Kewirausahaan (Entrepreneurship) Dalam Pandangan Islam (Historis-Politik dan Ekonomi)*. Penerbit NEM.
- Safitri, M. I. D., Ananda, C. F., & Prasetyia, F. (2021). Analisis dampak belanja pemerintah daerah terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif Jawa Timur. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik*, 6(2), 85-96.
- Stufflebeam, D. L., & Zhang, G. (2017). *The CIPP evaluation model: How to evaluate for improvement and accountability*. Guilford Publications.